



Menimbang-nimbang Refokusing Anggaran

■ Pemkot Siap Kaji SE Pemerintah Pusat Soal Realokasi Dana

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta siap melakukan kajian mengenai kebijakan refokusing anggaran, seiring adanya Surat Edaran (SE) dari pemerintah pusat. Sejauh ini, beberapa pemerintah daerah di DIY sudah mengambil keputusan untuk melaksanakannya.

Selaras dengan SE Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 terkait penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah, terdapat sejumlah refocusing. Terutama, berkaitan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Daerah (DID) serta Dana Alokasi Khusus (DAK).

Refocusing tersebut ditekankan pada penanganan pandemi Covid-19, termasuk dalam rangka penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. Teruntuk DAU, minimal dialokasikan 8 persen dengan memperhatikan tingkat kasus Covid-19 yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Merujuk SE itu, pemanfa-

LAKUKAN KAJIAN

- Pemkot Yogyakarta siap mengkaji kebijakan refokusing anggaran.
- Dalam postur APBD sudah ada BTT senilai Rp13 miliar.
- Pemkot menyebut struktur APBD 2021 sudah dianggap fokus sekaligus terperinci.

atannya adalah untuk mendukung vaksinasi, posko di kelurahan dan insentif tenaga kesehatan daerah. Sedangkan DID, minimal dialokasikan 30 persen dari yang diterima daerah di bidang kesehatan. Ketentuan lain, refokusing DAK fisik agar sebanyak mungkin menggunakan tenaga kerja lokal maupun bahan baku lokal.

"Kita siap saja untuk itu (refocusing anggaran). Kemarin, secara lisan sudah dibahas, kemudian sekarang dokumennya sedang kita kaji," terang Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, Jumat (26/2).

Ia pun menyampaikan, dalam penyusunan APBD 2021,

Pemkot Yogyakarta bersama kalangan legislatif sebenarnya sudah mempertimbangkan segala kegiatan penanganan Covid-19. Ya, mulai dari aspek pencegahan, penanganan, maupun pemulihan ekonomi. Sehingga, kegiatannya telah masuk dalam program reguler di setiap OPD.

"Untuk kegiatan darurat dan belum teralokasikan, tetap bisa terakomodir karena ada BTT (Biaya Tidak Terduga) yang tahun ini besarnya Rp13 miliar," katanya.

Selain itu, demi kehati-hatian dalam penyusunan anggaran, pihaknya juga melibatkan kejaksaan, khususnya dalam hal pencairan dan penggunaan BTT untuk penanganan pandemi Covid-19. Karenanya, Heroe meyakini, struktur APBD 2021 sudah dianggap fokus, sekaligus terperinci.

"Jadi, konstruksi APBD 2021 ini sudah cukup fokus dalam penanganan Covid-19. Mitra pemerintah juga terlibat agar kebijakan yang diambil tepat," pungkasnya.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Benny Suharsono, sebelumnya mengata-

kan, anggaran yang diperoleh Pemda DIY dari upaya realokasi tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp120 an miliar.

"Akan segera dilaporkan kita sudah lakukan konsolidasi ke dalam. Maret ini sudah dilaporkan ke Kementerian Keuangan," tandas Benny.

Adapun penggunaan anggaran realokasi diprioritaskan untuk penanganan Covid-19. Termasuk pelaksanaan vaksinasi dan kegiatan dukungan lainnya. Benny menegaskan, dana yang dihimpun tidak dialokasikan ke dalam anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Pemda DIY. Melainkan disuntikkan ke anggaran belanja operasional masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Benny menuturkan, bila upaya realokasi dana pusat tak mencukupi untuk menanggapi dampak pandemi di daerah, tak menutup kemungkinan bahwa Pemda DIY akan kembali melakukan realokasi dari APBD.

"Memang wajib dilakukan. Tapi bisa jadi kalau memang tidak cukup kita akan refocusing (dari APBD)," tandasnya. (aka/ro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005